BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembebanan hipotek kapal laut pada perjanjian kredit perbankan sangat digantungkan pada kedudukan Perjanjian Hypotek sebagai perjanjian tambahan merujuk pada beberapa norma yang berhubungan dengan pelayaran, Jabatan Notaris, hukum Perbankan serta Perjanjian para pihak. Pemikiran sederhana penjaminan hypotek kapal laut dapat dianalogikan dengan penjaminan dengan lembaga fidusia.
2. Pejabat yang terkait dengan pembebanan kapal laut adalah Notaris, Syahbandar dan pihak perbankan. Notaris adalah pejabat yang paling urgen dan memiliki kewenangan Dalam Pembebanan kapal laut. Syahbandar adalah pejabat pendukung yang berwenang memvalidasi obyek jaminan. Sehingga akta pembebanan yang bersifat mandiri hanya dapat dibuat oleh Notaris. Untuk itu diperlukan akta otentik yang mandiri agar dapat mewujudkan nilai keadilan bagi para pihak. Salah satu masalah dalam substansi hukum terkait dengan Undang-Undang Pelayaran adalah apakah regulasi mengenai hipotek kapal cukup efektif untuk meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dan perbankan dalam mendanai pengadaan kapal nasional. Ketidak jelasan atau ketidaktegasan dalam aturan mengenai hipotek kapal dapat menyebabkan keraguan di kalangan pihak-pihak yang terlibat dalam pendanaan, sehingga mempengaruhi kelancaran pembiayaan sektor pelayaran nasional. Di sisi lain,

terdapat kelemahan dalam struktur hukum yang mencakup berbagai lembaga terkait, seperti lembaga perbankan, lembaga lelang, dan lembaga eksekusi jaminan hipotek kapal. Kelemahan pada lembaga-lembaga ini dapat memperlambat proses pengelolaan jaminan hipotek kapal, baik dalam hal administrasi, eksekusi, maupun pelelangan. Selain itu, budaya hukum yang kurang mendukung efisiensi dan kejelasan dalam penegakan hak-hak kreditur turut menjadi kendala dalam menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan dapat diandalkan dalam sektor pelayaran..

3. Rekonstruksi hukum yang ideal dalam pembebanan hipotek kapal laut di Indonesia harus memenuhi prinsip Keadilan dan prinsip efisiensi. Prinsip otentisitas dipastikan sebagai kekuatan pembuktian akta dalam pembebanan hipotek kapal laut, dimana dimiliki oleh produk Hukum Notaris. Alur dan prosedur pembebanannya yang melibatkan banyak pihak mengakibatkan nilai otentisitas terdegradasi. Prinsip efisiensi sangat berguna bagi pembebanan kapal laut dengan menjadikan Notaris sebagai Pejabat yang berwenang membuat akta otentik hipotek kapal laut berdasarkan grosse kapal yang dibuat syahbandar saja. Diperlukan adanya pembaruan dalam aspek hukum yang mencakup beberapa pasal, antara lain: (a) Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, (b) Pasal 314 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (c) Pasal 60 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, (d) Pasal 224 HIR, dan (e) Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta hipotek kapal laut seharusnya dapat pula dibuat

oleh notaris dengan mempertimbangkan hal hal tertentu. aturan aturan yang mengatur pelayaran di indonesia ialah Undang –Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.Undang- Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Untuk itu rekonstruksi hukum diperlukan dengan melengkapi regulasi dalam bentuk Undang-undang Pembebanan Hipotek Kapal Laut, termasuk memuat proses pembebanan hingga penyelesaian sengketanya.

B. Saran

1. Perlu regulasi yang komprehensif dalam melengkapi proses pembebanan hipotek kapal laut. Perlu dipertimbangkan untuk menjadikan notaris sebagai pejabat berwenang dalam membuat akta hipotek dan pejabat syahbandar sebagai pejabat pencatat identitas kapal laut.
2. Pembuat undang-undang perlu memperhatikan kelengkapan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditor Hipotek. Dalam bentuk aturan aturan yang saling melengkapi, sehingga memberikan perlindungan bagi para pihak yang terkait dengan pembebanan hipotek kapal laut, tentunya dengan membuat undang-undang tentang hipotek kapal laut
3. Regulasi pembebanan kapal segera mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dan prinsip efisiensi dalam berbisnis. Menginisiasi pemerintah untuk menerapkan pendaftaran dan pembebanan secara elektronik.